

BAB III

POSTFUNCTIONALISM DALAM MERCOSUR (2000-2018)

Perkembangan integrasi kawasan Amerika Latin di bawah Mercosur akan dianalisis lebih lanjut dalam teori integrasi regional. Analisis perkembangan Mercosur di periode 2000-2018 akan di analisis lebih lanjut dalam perspektif postfunctionalism. Dalam memandang proses integrasi di sebuah regional, perspektif postfunctionalism memiliki poin yang berbeda dengan perspektif intergovernmentalism. Perspektif ini melihat pesimis terhadap proses integrasi regional dikarenakan integrasi yang melibatkan banyak aktor dan aspek lainnya akan menimbulkan reaksi di dalam politik domestik sebuah negara sehingga hal tersebut akan berdampak buruk pada proses integrasi. Postfunctionalism menekankan pada poin penting yaitu *self-determination* yang berasal dari aktor non-negara baik itu *interest groups*, partai ataupun dari elit politik itu sendiri. Dengan semakin berkembangnya proses integrasi di suatu regional maka semakin mengganggu *self-determination* suatu kelompok sehingga mereka akan melakukan praktik politisasi yang akan berdampak pada semakin jauhnya negara anggota dari terciptanya proses integrasi (Shimmelfennig, 2018, p. 23).

III.1 Perkembangan Integrasi Mercosur (2000-2018)

Untuk meneliti lebih lanjut proses integrasi Mercosur, pemahaman mengenai perspektif intergovernmentalism terhadap gagalnya integrasi Mercosur yang sudah dijelaskan di Bab 2 menjadi penting untuk dimasukkan ke dalam penelitian ini. Hal tersebut karena memiliki hubungan yang sangat erat dalam proses integrasi di periode 2000-2018. Dalam perkembangan integrasi Mercosur di periode 2000-2018, aktor non-negara mulai memiliki tempat dalam proses pengambilan kebijakan di suatu negara baik itu kebijakan yang menyangkut domestik, regional ataupun internasional dimana hal tersebut tidak terlihat di proses integrasi Mercosur periode 1991-2000. Meningkatnya pengaruh dari *non-state actor* di periode postfunctionalism dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: krisis yang terjadi di Amerika Latin seperti Brazil dan Argentina di akhir tahun 90an, menyebabkan tidak stabilnya perpolitikan dan perekonomian negara anggota Mercosur, tidak puasnya aktor non-negara terhadap proses integrasi yang menempatkan negara sebagai aktor sentral, faktor globalisasi, *public opinion* dan faktor dari perkembangan organisasi yang bersifat non-governmental (Dominguez & de Oliveira, 2004).

Perkembangan integrasi Mercosur saat ini belum memiliki progress yang signifikan. Hal tersebut dikarenakan seperti yang sudah di bahas sebelumnya di Bab 2, Mercosur saat ini masih belum mempunyai mekanisme yang jelas yang bisa mengatur dan mengawasi kebijakan yang telah dibuat di institusi untuk diterapkan di negara anggota. (Gomez, 2016). Faktor lain yang menjadi sangat penting dalam

belum berhasilnya Mercosur dalam melakukan integrasi adalah adanya politisasi yang dilakukan oleh beberapa kelompok kepentingan seperti asosiasi masyarakat, pelaku bisnis ataupun oleh partai oposisi yang ada di negara anggota. Sebagian besar penelitian melihat bahwa salah satu faktor yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya Mercosur dalam mewujudkan integrasi adalah kondisi politik domestik di negara anggota dimana hal tersebut akan mengeluarkan *output* yang langsung berhubungan dengan proses integrasi kawasan (Tulchin & Espach, 2002, p. 9). Berdasarkan hal tersebut, dengan adanya gejolak politik domestik di negara anggota seperti Paraguay dan Uruguay akan berpengaruh terhadap proses integrasi kawasan (Chrstitensen, 2007, p. 139).

Politisasi yang ada di negara anggota terhadap integrasi kawasan berhubungan erat dengan interaksi dan kepentingan dari elit politik di suatu negara. Kelompok kepentingan tersebut melakukan praktik politisasi dikarenakan banyak hal seperti: ketidakpuasan mereka dengan mekanisme yang ada di sebuah institusi regional dan dikarenakan adanya kepentingan yang akan terganggu jika proses integrasi tersebut berhasil diwujudkan (Malamud, 2003, p. 68). Hal ini kemudian menjadi menarik untuk dianalisis karena akan mengetahui praktik politisasi yang terjadi di masing-masing negara anggota sehingga berdampak pada gagalnya Mercosur dalam menciptakan integrasi kawasan di fase postfunctionalism.

III.2 Politisasi di Brazil

Permasalahan politik dan komersil yang semakin berkembang terutama paska devaluasi mata uang Brazil di akhir tahun 1990an membentuk adanya gejolak

politisasi di negara anggota untuk menentang proses integrasi tersebut tak terkecuali di politik domestik Brazil. Gerakan yang menolak keberadaan Mercosur di Brazil sebenarnya sudah di mulai pada tahun 1996-1997, namun dikarenakan terbatasnya ruang aktor-non negara untuk terlibat di dalam mekanisme pembuatan kebijakan terkait integrasi Mercosur membuat aktor non-negara tersebut tidak memiliki cukup power dalam proses integrasi.

Pada tahun 1996-1997, ketika terjadi banyak sengketa perdagangan internasional yang melibatkan negara anggota Mercosur, tren penolakan di Brazil diawali oleh beberapa kelompok kepentingan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kelompok kepentingan di Brazil

No	Nama Kelompok Kepentingan	Sektor Kepentingan	Kepentingan
1	Sao Paulo State Federation of Industry (FIESP)	Industri swasta	Melindungi perusahaan swasta dan ekonomi berbasis pasar
2	The National Confederation of Industry (CNI)	Industri lokal dan Manufaktur	Melindungi pelaku bisnis domestik dan manufaktur
3	Landless Worker's movement (MST)	Agrikultur	Melindungi petani dan pekerja miskin

Meskipun ketiga kelompok diatas memiliki pendapat yang sama untuk menolak Mercosur, namun pada praktiknya kelompok tersebut memiliki kepentingan yang berbeda dalam penolakan Mercosur. Dari sudut pandang FIESP dan CNI, dengan terwujudnya integrasi di bawah Mercosur akan berpengaruh pada sempitnya kapasitas negara untuk menjalin kerja sama yang lebih luas. Selain itu, dengan susahnyaperaturan Mercosur untuk berasimilasi di level domestik Brazil khususnya dengan

kepentingan elit dan kelompok kepentingan di Brazil juga membuat adanya tuntutan dari kelompok kepentingan terhadap pemerintah Brazil melalui negosiasi untuk lebih terlibat aktif di Free Trade Area of the Americas (FTAA), negosiasi baru dengan WTO, dan membentuk kerja sama BRIC (Brasil, Rusia, India dan Tiongkok), dibandingkan di Mercosur. (Vigevani & Junior, 2016, pp. 132-133).

Berbeda halnya dengan kedua kelompok kepentingan sebelumnya, penolakan MST terhadap Mercosur dikarenakan adanya kebijakan yang Brazil yang membahayakan petani dan pekerja miskin. Keikutsertaan Brazil di pasar terbuka di Mercosur membuat pemerintah Brazil lebih memilih untuk fokus terhadap upaya menarik investor asing, sehingga dukungan terhadap sektor agrikultur menghilang. Selain itu, dengan meningkatnya perdagangan sektor agrikultur di Mercosur membuat petani dan pekerja miskin di Brazil tidak mampu bersaing karena kehilangan dukungan berupa subsidi dari pemerintah Brazil. Akibatnya, terjadi penolakan yang bersifat masif terhadap Mercosur yang datang dari kelompok petani dan pekerja miskin. Melalui MST, kelompok tersebut berhasil mengumpulkan ribuan petani dan pekerja miskin untuk melakukan upaya penolakan terhadap keikutsertaan Brazil di Mercosur. Sebagai bentuk penolakan keikutsertaan Brazil di Mercosur, kelompok tersebut melakukan upaya dengan melakukan okupasi lahan yang ada di Brazil (Cassel, Amanda; Patel, Raj, 2003, p. 13).

Penolakan terhadap Mercosur dari kelompok kepentingan yang ada di Brazil terus berlanjut. Pada November 2004, penolakan terhadap Mercosur datang dari kelompok kepentingan dari perwakilan industri seperti: FIESP, Abicalcados (asosiasi

produsen sepatu Brazil), Eletros (asosiasi produsen produk elektronik nasional), dan AEB (asosiasi perdagangan luar negeri dari Brazil), mengadakan sebuah pertemuan untuk mendiskusikan gagasan mengundurkan diri proses integrasi di Mercosur dimana hal tersebut disebabkan oleh tidak sempurnya *custom union* di Mercosur sehingga kelompok tersebut lebih memilih untuk terlibat di *free trade agreement* terutama dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Namun, Keinginan kelompok kepentingan tersebut tidak dapat tercapai dikarenakan larangan yang ada di Mercosur mengenai negosiasi kerja sama negara anggota harus melalui Mercosur dan tidak memungkinkan bagi negara anggota untuk menjalin kerja sama secara bilateral dan multilateral tanpa melalui Mercosur. Berdasarkan fakta tersebut, beberapa perwakilan kelompok kepentingan industri menilai bahwa Brazil hanya digunakan oleh Mercosur sebagai alat untuk melakukan negosiasi internasional, sehingga hal tersebut mengganggu langkah Brazil untuk memiliki kesepakatan secara bilateral dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Dengan kata lain, Mercosur merupakan penghambat bagi Brazil untuk menjalin kerja sama ekonomi yang lebih luas (Vigevani & Junior, 2016, pp. 132-133).

Gejolak penolakan terhadap keberadaan Mercosur terus melahirkan penolakan dari kelompok kepentingan yang ada di Brazil. Kelompok serikat buruh di Brazil merupakan salah satu kelompok yang menolak integrasi Mercosur. Serikat buruh Brazil beranggapan bahwa perdagangan bebas menimbulkan sebuah paradoks dalam memahami relevansi standar ketenagakerjaan dalam perdagangan bebas baik itu di dalam proses integrasi Mercosur maupun FTAA. Serikat buruh Brazil juga

beranggapan bahwa masih ada gap yang tinggi antara pekerja yang ada dalam negara Brazil sehingga dengan di implementasikannya perdagangan bebas justru akan semakin memparah gap pekerja yang ada di Brazil dan melemahkan posisi serikat buruh itu sendiri. Oleh karena itu, serikat buruh di Brazil dengan tegas menolak adanya perjanjian perdagangan. Standar ketenagakerjaan yang di atur di dalam perjanjian perdagangan bebas baik itu di dalam Mercosur ataupun FTAA belum mampu mengatasi ketidaksetaraan struktural sehingga dengan adanya perdagangan bebas, posisi gap yang ada di negara berkembang di dalam ekonomi tidak akan bisa diatasi (Riethof, 2017, pp. 32-33).

Penolakan terhadap Mercosur tidak hanya berasal dari kelompok pelaku bisnis dan asosiasi di Brazil, akan tetapi juga dari partai oposisi di Brazil yaitu The Brazilian Social Democracy Party. Partai oposisi tersebut menuntut adanya pemotongan belanja publik serta melakukan hubungan perdagangan bilateral di luar mekanisme Brazil. Namun, partai tersebut tidak memiliki cukup power untuk mengimplementasikan keinginan tersebut dikarenakan pada pemilu 2011, calon presiden Brazil yang diajukan oleh partai oposisi gagal dalam meraih suara dan harus dikalahkan oleh Dilma Rousseff yang berasal dari partai The Worker's party yang memiliki keinginan berbanding terbalik dengan partai oposisi dimana partai tersebut mengedepankan pada pengeluaran social yang tinggi dan melanjutkan hubungan yang baik dengan Mercosur. Berikut merupakan peta kepentingan kedua partai tersebut:

Tabel 3.2 Peta Kepentingan Partai Politik di Brazil

Nama Partai Politik	Platform/Ideologi	Kebijakan
---------------------	-------------------	-----------

The Worker's Party	Kiri / demokratis sosialis	<ul style="list-style-type: none"> • High social spending • Continued Engagement with Mercosur
The Brazilian Social Democracy Party	Tengah-Kiri / sosial demokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Cut in public spending • Liberalize trade relationship outside Mercosur

Source: (Jain, 2014)

Hubungan pelaku bisnis dengan pemerintah Brazil telah terjadi sejak lama yaitu pada tahun 1980an dimana pada saat itu pemerintah Brazil memperkenalkan kebijakan *Import Substitution Industry* (ISI) terhadap pelaku bisnis yang ada di negara tersebut. Namun, kebijakan tersebut tidak berjalan secara efektif dikarenakan adanya praktik privatisasi dan deregulasi oleh pemerintah sehingga mengakibatkan tingginya angka inflasi yang merugikan perusahaan. Di periode 2000an awal, hubungan di antara keduanya mulai memasuki babak baru dimana hubungan tersebut ditandai dengan jaminan yang diberikan oleh pemerintah Brazil untuk tidak melakukan intervensi. Pada masa pemerintahan Lula, pemerintah dengan tegas mendukung terciptanya situasi yang ramah terhadap pelaku bisnis di Brazil. Pada periode pertama kepemimpinannya (2003-2006), Lula membuat sebuah institusi untuk terkait kebijakan yang tercantum dalam undang-undang nomor 10,973/2004 dan 11,196/2005 mengenai dukungan pemerintah terhadap inovasi teknologi. Lula juga membentuk National Industrial Development Council (CNDI) dan Brazilian Development Agency (ABDI) yang bertujuan untuk pengawasan kelembagaan atas formulasi dan implementasi kebijakan. Tindakan Lula tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah perusahaan MNC di Argentina dari 165 di 2005 menjadi 226 di 2008 (Doctor, 2010).

Dengan adanya hubungan yang erat antara bisnis dan pemerintah di Brazil, maka keterlibatan bisnis dalam proses pembuatan kebijakan di level ekonomi makro akan sangat mungkin terjadi. Hal tersebut dikarenakan jika pemerintah membuat sebuah kebijakan yang menyebabkan munculnya “*winner and losers*” maka pelaku bisnis tersebut akan mempengaruhi pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan dan bahkan membuat koalisi yang menolak kebijakan pemerintah tersebut. Pelaku bisnis memiliki cukup power di level domestik yang disebabkan oleh adanya faktor kepemilikan modal yang bisa digunakan baik untuk mendukung legitimasi pemerintah atau bahkan melemahkan legitimasi tersebut (Silva Rego & Roder Figueira, 2017). Penolakan terhadap proses integrasi oleh pelaku bisnis dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.3 Penolakan terhadap Mercosur di Brazil

Kelompok Kepentingan	Bentuk Penolakan	Hasil
Sao Paulo State Federation of Industry (FIESP)	Membentuk pertemuan untuk mendiskusikan rencana penolakan terhadap Mercosur dengan lebih memilih menjalin kerja sama di FTA dengan Amerika Serikat atau Uni Eropa	Gagasan tersebut di tolak Mercosur dikarenakan melanggar peraturan Mercosur dimana dalam menjalin kerja sama, negara anggota harus melalui Mercosur dan tidak dibenarkan melalui jalur bilateral.
Abicalcados (asosiasi produsen sepatu Brazil)		
Eletros (asosiasi produsen produk elektronik nasional)		
AEB (asosiasi perdagangan luar negeri dari Brazil)		

Source: (Vigevani & Junior, 2016)

Jika di analisis melalui postfunctionalism maka dapat dilihat bahwa aktor dalam proses integrasi di fase postfunctionalism tidak lagi berpusat pada negara sebagai aktor sentral, tetapi juga mempertimbangkan aktor non-negara yang terdiri dari elit politik, pelaku bisnis serta organisasi atau asosiasi masyarakat dalam proses integrasi kawasan. Postfunctionalism memandang pesimis terhadap proses integrasi dimana akan ada praktik politisasi yang dilakukan oleh kelompok kepentingan di dalam negara terhadap proses integrasi. Politisasi tersebut dilakukan karena adanya anggapan bahwa dengan adanya integrasi maka akan membatasi ruang dari kelompok kepentingan dalam memenuhi kepentingannya sehingga hal tersebut akan berdampak pada gagalnya institusi kawasan dalam mewujudkan integrasi. Berdasarkan konteks tersebut, dapat dilihat bahwasannya upaya yang dilakukan oleh ketiga perusahaan besar di Brazil tersebut adalah untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah terhadap integrasi atau dengan kata lain untuk menjauhkan Brazil dari proses integrasi.

III.3 Politisasi di Argentina

Tren politisasi terhadap integrasi kawasan dibawah Mercosur di Argentina sangat berbeda dengan praktik politisasi di Brazil. Praktik politisasi di Argentina lebih di dominasi oleh pergerakan asosiasi buruh terutama oleh salah satu asosiasi buruh terbesar di Argentina yaitu *Argentine Workers' Congress* (CTA) dibandingkan oleh pelaku bisnis di negara tersebut. Hal yang melatarbelakangi pergerakan buruh di Argentina terutama di masa pemerintahan Macri adalah karena sejak di bawah pemerintahan Presiden Menem (1989-1999), asosiasi buruh di Argentina merupakan

salah satu kelompok kepentingan yang mendapat perhatian istimewa dari pemerintah.

Berikut adalah kebijakan Presiden Menem yang berpihak kepada buruh:

1. Kebijakan mengenai pengaturan hari kerja buruh dan pemberian uang lembur
2. Kebijakan mengenai hak buruh wanita dan anak muda di atas 24 tahun untuk dapat bekerja
3. Kebijakan yang mengatur gaji buruh
4. Kebijakan yang mengatur hak buruh untuk mendapatkan definisi dan deskripsi pekerjaan dari perusahaan
5. Kebijakan mengenai pengaturan hari libur buruh
6. Kebijakan mengenai hak buruh untuk melakukan negosiasi secara kolektif melalui serikat buruh

Beberapa kebijakan pemerintah Argentina di bawah Presiden Menem tersebut bertujuan tidak hanya untuk fleksibilitas dari buruh, kebijakan tersebut juga digunakan untuk memenuhi tuntutan perubahan ekonomi global yang cepat serta untuk mengurangi biaya tenaga kerja yang berdampak pada tidak kompetitifnya industri Argentina baik itu di level regional maupun di level internasional. Kebijakan tersebut juga menegaskan komitmen pemerintah Argentina untuk menjadi sahabat bagi pelaku bisnis dan untuk dapat bersaing dengan negara anggota Mercosur lainnya seperti Brazil, Paraguay dan Uruguay yang sedang menghadapi tuntutan mengenai labour costs dan aturan mengenai fleksibilitas tempat kerja dari buruh (Richards, 2015, pp. 60-62).

Perhatian pemerintah terhadap buruh juga berlanjut setelah pemerintahan Menem yaitu di bawah kepemimpinan Nestor Kirchner (2003-2007) dan Cristina Kirchner (2007-2015). Pemerintahan Kirchner membuat kebijakan yang “labour friendly” dimana pemerintah memperkuat peran dari asosiasi buruh dalam berpartisipasi di proses pembuatan kebijakan ekonomi yang menyangkut ketenagakerjaan dan upah dengan mempromosikan empat kebijakan seperti:

1. Perundingan bersama di tingkat swasta dan negara.
2. Dewan upah minimum
3. Komisi Nasional terkait sektor agrarian
4. Perjanjian guru nasional.

Dari beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah di bawah pemerintahan Kirchner dapat di lihat bahwa posisi asosiasi buruh terutama dalam mempengaruhi proses pengambilan kebijakan di level pemerintahan yang bersifat ekonomi makro menjadi lebih kuat dari sebelumnya (Dobrusin, 2012, p. 66).

Hubungan yang harmonis yang terjalin antara buruh dan pemerintahan Menem dan Kirchner buruh, tidak terjadi pada masa pemerintahan Macri. Asosiasi buruh tidak lagi memiliki power yang kuat seperti yang pada pemerintahan sebelumnya. Krisis ekonomi yang terjadi di masa pemerintahan Kirchner dan adanya kebijakan proteksi ekonomi yang menyebabkan berkurangnya kepercayaan investor terhadap negara tersebut, memaksa Macri untuk melakukan reformasi beberapa kebijakan untuk menghemat pengeluaran negara. Beberapa kebijakan Macri tersebut adalah:

1. Pemotongan dana Pensiun
2. Kebijakan pemotongan bantuan anak dari keluarga miskin
3. Pembuatan UU Pajak yang bertujuan untuk mengurangi pajak dari perusahaan asing dan menaikkan pajak dari kelas pekerja.

Kebijakan Macri tersebut dianggap oleh CGT (General Confederation of Labor of the Argentine Republic) sebagai usaha yang tidak berpihak kepada buruh. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh pemimpin asosiasi CTA yaitu Pablo Michelli yang menyatakan bahwa reformasi kebijakan terkait buruh hanya akan menguntungkan salah satu kelompok saja dalam hal ini kelompok ekonomi, tanpa mempertimbangkan keberlangsungan hidup pekerja (Misculin, 2018). Reformasi kebijakan buruh tersebut menjadi salah satu penyebab dari tidak harmonisnya hubungan pemerintah dengan kelompok asosiasi buruh. Pengesahan UU tenaga kerja tersebut kemudian harus ditunda di Kongres karena adanya pengaruh dari kelompok oposisi, serikat buruh dan masyarakat umum, sehingga membuat pemerintah harus melakukan koordinasi dengan serikat buruh dari masing-masing sektor yang ada di negara tersebut. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Macri berdampak pada melemahnya dukungan masyarakat terhadap pemerintah Argentina (Farcy, 2018).

Presiden Macri kemudian juga membuat kebijakan untuk membuka pasar Argentina guna mendekatkan negara tersebut baik di level regional ataupun internasional. Gerakan penolakan terhadap kebijakan tersebut tidak hanya datang dari kelompok kepentingan asosiasi buruh, tetapi juga dari kelompok usaha kecil menengah (UKM), koperasi dan ekonomi populer lainnya yang ada di negara

tersebut. Kebijakan tersebut berdampak pada semakin buruknya kondisi dari kelompok tersebut yang mempekerjakan sebesar 75% tenaga kerja di Argentina. Beberapa faktor yang menjadi penyebab semakin buruknya kondisi dari kelompok tersebut adalah karena: adanya komitmen dari pemerintah untuk mengimplementasikan aturan Mercosur mengenai tidak melakukan privatisasi serta terlibat aktif dalam proses integrasi Mercosur dengan membuka pasar dimana hal tersebut tidak terjadi pada masa pemerintahan Kirchners yang lebih melakukan privatisasi untuk melindungi industri kecil di Argentina (MErcoPress, 2017). Kebijakan pembukaan pasar Argentina untuk impor produk murah menyebabkan industri nasional tidak dapat bersaing serta peningkatan pajak dan biaya layanan umum seperti gas, listrik, air dan transportasi umum (Farcy, 2018). Sebagian besar bisnis di sektor tersebut memproduksi produk untuk pasar lokal dimana akibat kebijakan baru tersebut, penjualan produk mengalami pengurangan dikarenakan menurunnya pendapatan masyarakat.

Kondisi tersebut semakin memburuk ketika sebesar 35% dari UKM menurunkan produksi mereka, memecat sebagian besar pekerja dan mengurangi jam kerja buruh. Pada februari 2018, terjadi demonstrasi besar-besaran yang terdiri dari berbagai kelompok kepentingan dimana mereka menolak kebijakan pemerintah terkait pendekatan negara dengan institusi regional maupun internasional. Beberapa kelompok kepentingan yang ikut serta dalam demonstrasi tersebut adalah organisasi politik yang datang dari kelompok kiri, serikat buruh seperti Confederation of Workers of the Popular Economy (CTEP) dan CGT serta dari gerakan sosial

masyarakat (Farcy, 2018). Demonstrasi yang di lakukan oleh beberapa kelompok tersebut bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah Argentina yang bisa berdampak pada semakin parahnya kondisi perekonomian negara dikarenakan tidak siapnya sektor domestik untuk menghadapi ancaman yang datang baik itu dari regional maupun internasional.

Selain itu, kelompok kepentingan lainnya yang terlibat dalam demonstrasi melawan kebijakan reformasi Macri adalah seperti: General Confederation of Labor (3 juta anggota), the Argentine Worker’s Central Union (1.5 Juta anggota) dan the Association of State Workers (250 ribu anggota) yang melakukan aksi demonstrasi di Buenos Aires. Penolakan terhadap kebijakan Macri tersebut tidak hanya datang dari kelompok kepentingan akan tetapi juga dari mantan Presiden Argentina yaitu Christina Fernandez de Kirchner, melalui media, akan terlibat di dalam demonstrasi tersebut untuk melindungi pekerjaan masyarakat Argentina dan melawan kebijakan Macri yang mengancam banyak pihak seperti buruh dan pelaku bisnis domestik di Argentina (Telesur, 2018).

Kelompok buruh di Argentina memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu kekuatan politik negara Argentina karena memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah (Richards, 2015, pp. 60-62). Dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah, kelompok kepentingan di Argentina memiliki beberapa sarana penting seperti:

Tabel 3.4 Sarana Kelompok Kepentingan di Argentina

Kategori	Definisi	Contoh Pendekatan
----------	----------	-------------------

Politik	Kelompok kepentingan seperti pelaku bisnis dan buruh bisa menggunakan partai untuk memberikan pengaruh ke pemerintah.	Kelompok kepentingan menggunakan partai Peron untuk mempengaruhi Menem untuk membuat kebijakan seperti privatisasi, reformasi pajak dan deregulasi ekonomi yang berpihak pada buruh, sektor bisnis domestic dan kelas menengah (Ozdemir, 2015).
Non Politik	Kelompok kepentingan bisa mempengaruhi pemerintah melalui cara non-politik seperti lobi, demonstrasi, pemberontakan buruh.	Demonstrasi pada Februari 2018 yang di inisiasi oleh kelompok kepentingan seperti the General Confederation of Labor, the Argentine Worker's Central Union dan the Association of State Workers untuk melawan pemerintahan Macri terkait reformasi kebijakan buruh dan membuka pasar argentina sebagai dukungan terhadap proses integrasi Mercosur

Source: (Steinberg, 2015).

Dari beberapa permasalahan yang ada di Argentina tersebut dapat dilihat bahwa langkah pemimpin negara untuk terlibat aktif di dalam aktifitas integrasi Mercosur akan masih sangat sulit untuk dilakukan. Hal tersebut dikarenakan beberapa aturan Mercosur termasuk untuk membuka negara ke pasar bebas masih menjadi ancaman bagi beberapa kelompok kepentingan di Argentina seperti buruh dan pelaku bisnis, sehingga menyebabkan gejolak yang berdampak pada aksi demonstrasi yang masif untuk menolak kebijakan tersebut. Di lihat dari perspektif postfunctionalism, aksi demonstrasi tersebut adalah upaya politisasi yang dilakukan oleh kelompok kepentingan dikarenakan adanya ancaman terhadap kepentingan sebuah kelompok. Jika dilihat dari perspektif postfunctionalism maka demonstrasi yang di inisiasi oleh kelompok kepentingan tersebut merupakan salah satu praktik politisasi yang bertujuan untuk menolak kebijakan pemerintah terkait dukungan terhadap proses integrasi. Dengan kata lain, keberadaan aktor non-negara tersebut justru menginginkan Argentina untuk menjauh dari proses integrasi Mercosur dimana integrasi tersebut akan mengancam kepentingan kelompok.

III.4 Politisasi di Paraguay

Dalam sejarah perkembangan negara Paraguay terutama pada periode 2000-2018, terdapat beberapa kelompok kepentingan yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Beberapa kelompok tersebut terdiri dari:

Tabel 3.5 Kelompok Kepentingan di Paraguay

Nama Kelompok Kepentingan	Kepentingan	Sikap Terhadap Mercosur
Labor Unions	Melindungi hak buruh	Menentang keanggotaan Paraguay untuk menjadi anggota Mercosur karena akan ada ancaman dari elit politik dan ekonomi terhadap hak buruh
Trade Unions	Melindungi bisnis	Menentang pasar terbuka Mercosur
Rural Massses and Land	Melindungi petani dan pemilik tanah	Menentang <i>free movement of investment</i> Mercosur melalui reformasi kepemilikan tanah

Source: (Birch, 2013)

Tren politisasi yang terjadi di Paraguay berbeda dengan praktik politisasi yang terjadi di Argentina dan Brazil dimana aktor yang berperan dalam politisasi di kedua negara tersebut adalah bisnis dan asosiasi buruh. Aktor yang sangat kuat di Paraguay adalah partai Colorado yang telah menguasai perpolitikan negara selama 62 tahun yang kemudian harus di akhiri setelah Fernando Lugo dari partai koalisi *centre-left* yaitu Patriotic Alliance for Change (APC) terpilih menjadi presiden baru Paraguay pada tahun 2008 (Wright, 2015). Partai Colorado menjadi aktor yang paling kuat untuk memberikan pengaruh baik itu ke pemerintah ataupun ke kondisi politik Paraguay, karena kelompok kepentingan yang ada di Paraguay seperti partai buruh hanya merupakan kelompok kecil dan kelompok yang terdiri dari pelaku bisnis hanya menyumbang 15% di perekonomian Paraguay sehingga tidak memiliki power yang

cukup kuat untuk melakukan perlawanan meskipun terdapat potensi ancaman impor dari negara Mercosur lainnya (Birch, 2013, p. 6).

Kontroversi mengenai keikutsertaan Paraguay dalam proses integrasi telah sering terjadi di negara tersebut Dengan kondisi negara sebagai negara *landlock* membuat pemimpin negara yaitu Fernando Lugo harus melakukan beberapa usaha dalam mencari akses untuk melakukan kegiatan ekonomi. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Lugo adalah mendekati diri dengan Mercosur dan mendukung semua kebijakan yang ada di institusi tersebut. Untuk terlibat aktif di dalam Mercosur, negara harus membuka pasarnya terutama dalam impor dan ekspor. Namun, dikarenakan sebagian besar pelaku bisnis yang ada di Paraguay merupakan perusahaan kecil sehingga keterbukaan Paraguay di perdagangan bebas akan sangat rentan terhadap ancaman yang datang dari perusahaan besar yang ada di negara anggota Mercosur terutama Brazil dan Argentina. Hal tersebut yang membuat pelaku bisnis di Paraguay menolak kebijakan pemerintah untuk membuka pasar dan menginginkan negara untuk tidak terlibat dalam proses tersebut (Cortez, 1993).

Terpilihnya Fernando Lugo pada 2008 menandai berakhirnya dominasi partai Colorado selama 62 tahun dan berakhirnya masa diktator di Paraguay. Pada awalnya, naiknya Fernando Lugo sebagai presiden baru Paraguay mendapat dukungan sebesar 90% dari masyarakat Paraguay. Beberapa kebijakan utama yang dibawa oleh Lugo dalam kampanye nya ialah menyelesaikan permasalahan kemiskinan, kesehatan, isu sosial, mengatasi praktik korupsi di negara tersebut dan membangun hubungan baik

dengan Brazil melalui regenerasi perjanjian Itaipu Dam Treaty. Namun, dukungan terhadap presiden Lugo tidak bertahan dikarenakan adanya kebijakan baru mengenai reformasi kepemilikan tanah yang kemudian mendapat protes keras dari kelompok pekerja dan petani. Sektor agrikultur menjadi salah satu sektor yang mendukung perekonomian negara Paraguay dimana sektor tersebut menyumbang 23% dari total GDP dan mempekerjakan buruh sebanyak 26.5%. Isu kepemilikan tanah selalu menjadi isu yang sensitif di negara tersebut karena hanya sebesar 2% dari total populasi yang memiliki tanah sebesar 80%, sehingga kebijakan pemerintah mengenai reformasi kepemilikan tanah menimbulkan konflik antara pemerintah dan pekerja (Marsteintredet, Llanos, & Nolte, 2013, pp. 112-113). Permasalahan yang terjadi di sektor agrikultur menjadi awal dari gejolak politik domestik di Paraguay yang menyebabkan terganggunya proses demokrasi, sehingga berdampak pada proses integrasi dan posisi keanggotaannya di Mercosur.

Konflik tersebut melibatkan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok petani yang mengalami pengusuran lahan terjadi secara berulang seperti pada masa pemerintahan Luis Gonzales Macchi (1999-2003) dan Duarte Frutos (2003-2008). Pada masa pemerintahan Lugo, gerakan perlawanan tidak hanya dilakukan oleh kelompok petani tetapi juga kelompok pemberontak seperti the Paraguayan People's Army (EPP) yang menjadi lebih aktif untuk melawan kebijakan pemerintah terutama pada masa Lugo (Marsteintredet, Llanos, & Nolte, 2013, pp. 112-113). Berdasarkan data yang diambil dari halaman *reuters*, untuk mewujudkan kebijakan reformasi kepemilikan tanah, Lugo mengerahkan militer dan polisi dalam menghadapi gerakan

pemberontakan dari masyarakat. Konflik tersebut menyebabkan sebanyak 8 polisi dan 9 petani meninggal yang menjadi insiden terburuk yang terjadi di Paraguay terutama dalam dua dekade terakhir (Desantris & Cristaldo, 2012).

Melihat adanya respon negatif terhadap kepemimpinan Lugo dan lemahnya posisi Lugo dan partai APC karena partai the Liberal Party (PLRA) memutuskan untuk meninggalkan koalisi menyebabkan partai Colorado mulai merencanakan praktik politisasi dengan tujuan untuk memberhentikan Lugo sebagai presiden terpilih Paraguay. Kemampuan partai Colorado dalam melakukan praktik politisasi dikarenakan sebagian besar kursi yang ada di kongres Paraguay masih di kuasai oleh Partai tersebut. Pada Desember 2009, sebanyak 600 delegasi partai Colorado di kongres Paraguay sepakat untuk mengadakan diskusi terkait rencana pemberhentian Lugo sebagai presiden. Rencana tersebut mendapat dukungan dari fraksi *Movimiento Vanguardia Colorado*, mantan wakil presiden Luis Castiglioni, *Rural Association of Paraguay* yang mewakili peternak sapi dan *the Paraguay Soybean Association* yang mewakili 50 ribu suara petani yang mengontrol sebagian besar produksi kedelai di Paraguay (Oxford Analytica, 2009). Pada 21 Juni 2012, sebanyak 76 suara di kongres memilih untuk memberhentikan Lugo sebagai presiden dan sebanyak 39 suara senat mengkonfirmasi keputusan tersebut yang menandakan berakhirnya kepemimpinan Lugo sebagai presiden yang telah memulai perubahan demokratis pertama dalam sejarah kepemimpinan di Paraguay (LAB, 2013).

Permasalahan politik domestik yang terjadi di Paraguay kemudian memiliki dampak langsung terhadap proses integrasi Mercosur. Gejolak politik yang

melibatkan partai Colorado dan beberapa kelompok kepentingan dalam usaha untuk memberhentikan Lugo tersebut mendapatkan kecaman keras dari Mercosur yang menilai bahwa pemberhentian paksa terhadap Lugo merupakan pelanggaran terhadap aturan Mercosur yang ada di protokol Ushuaia mengenai komitmen negara anggota untuk menerapkan sistem demokrasi (Portes, 2017, p. 63). Akibatnya, beberapa institusi regional termasuk Mercosur melakukan suspend terhadap keanggotaan Paraguay (Lambert & Nickson, 2013). Pada 29 Juni 2012, melalui pertemuan Unasur-Mercosur di Mendoza, Argentina, menghasilkan keputusan bahwa kedua institusi regional tersebut sepakat untuk memberikan *suspend* terhadap Paraguay dengan alasan bahwa negara tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi. *Suspend* tersebut akan terus berlaku sampai pemilihan presiden kembali melalui demokrasi pada 2013. Untuk memastikan perkembangan politik kearah yang lebih positif di Paraguay, Unasur membuat sebuah komisi yang diketuai oleh mantan Perdana Menteri Peru Salomon Lerner guna melakukan monitor terhadap situasi politik domestik Paraguay (Marsteintredet, Llanos, & Nolte, 2013, pp. 112-113).

Pemberhentian paksa Lugo sebagai presiden tersebut tidak hanya mendapatkan kecaman keras dari institusi regional seperti Mercosur tetapi juga dari negara-negara Amerika Latin seperti Kolombia, Bolivia, dan dua negara lainnya yaitu Chile dan Venezuela yang menarik duta besar nya dari Paraguay (CNN, 2012). Penarikan duta besar tidak hanya dilakukan oleh Chile dan Venezuelan akan tetap juga dilakukan oleh negara anggota Mercosur. Argentina, Brazil dan Uruguay mengancam keras pemberhentian Lugo tersebut dan menarik duta besar mereka yang

di Paraguay sebagai bentuk kritik terhadap krisis demokrasi yang terjadi di Paraguay (Desantis & Nejamkis, 2012). Dengan adanya penarikan duta besar yang dilakukan beberapa negara Amerika Latin termasuk negara anggota Mercosur, menjadi penghambat terhadap proses integrasi kawasan di bawah Mercosur karena tingginya tensi antarnegara anggota.

Pemberlakuan *suspend* terhadap Paraguay oleh Mercosur, juga membuat hubungan antara Paraguay dan Mercosur menjadi tidak harmonis. Pemerintah Paraguay menilai bahwa Mercosur telah melanggar peraturan yang tercantum dalam Protokol Ushuaia untuk memberikan pembelaan diri terkait komitmen demokratis. Dengan kata lain, Paraguay menganggap bahwa Mercosur telah melakukan standar ganda karena melakukan *suspend* tanpa adanya kesempatan Paraguay untuk membela diri terkait komitmen demokratis. Protes keras Paraguay terhadap Mercosur juga disebabkan oleh adanya pernyataan Venezuela yang mengklaim keanggotaannya di Mercosur tanpa melewati ratifikasi di kongres Paraguay dimana hal tersebut menurut politisi Paraguay merupakan pelanggaran terhadap perjanjian yang ada di Mercosur. Dengan pemberian *suspend* dari institusi regional seperti Mercosur dan ditambah lagi dengan buruknya hubungan dengan negara anggota Mercosur terutama pasca penarikan duta besar di Paraguay, menjadi penghambat proses integrasi Mercosur sampai saat ini (Marsteintredet, Llanos, & Nolte, 2013, pp. 112-113).

Dari usaha pemberhentian Lugo sebagai presiden dapat dilihat bahwa salah satu alasan yang melatarbelakangi usaha tersebut dikarenakan adanya kepentingan kelompok yang terancam baik karena naiknya Lugo sebagai presiden ataupun karena

adanya pengaruh dari kebijakan di bawah kepemimpinan Lugo. Naiknya Lugo sebagai presiden terpaksa harus mengakhiri dominasi dari partai Colorado di Paraguay yang telah memimpin negara tersebut selama 62 tahun. Kekalahan tersebut kemudian menyebabkan adanya usaha untuk mengambil alih kekuasaan kembali, ditambah lagi dengan adanya faktor pendukung yaitu pergerakan dari kelompok petani yang merasa terancam karena reformasi kebijakan kepemilikan tanah, membantu dalam mewujudkan usaha tersebut. Meskipun gejolak tersebut terjadi di level domestik hal tersebut tetap memberikan pengaruh langsung terhadap proses integrasi regional Mercosur karena upaya pemberhentian paksa Lugo sebagai Presiden telah melanggar aturan yang dibuat oleh Mercosur terutama mengenai komitmen demokrasi negara anggota. Jika dianalisis dengan menggunakan perspektif postfunctionalism, praktik politisasi yang dilakukan oleh partai dan kelompok kepentingan dalam rangka memenuhi kepentingannya berdampak pada semakin buruknya citra negara di dunia internasional khususnya di institusi regional yaitu Mercosur dan berdampak pada terhambatnya proses integrasi Mercosur.

III.5 Politisasi di Uruguay

Tren Politisasi yang terjadi di fase postfunctionalism Mercosur tidak hanya terjadi di negara Brazil, Argentina dan Paraguay, akan tetapi juga di Uruguay. Uruguay merupakan salah satu negara anggota Mercosur yang memiliki kelompok kepentingan dalam jumlah yang besar. Sejak berakhirnya kepemimpinan otoriter pada abad 20, kelompok kepentingan Uruguay di sektor politik di kuasai tiga partai besar yaitu Partai the Colorado, Partai Blanco dan partai koalisi sayap kiri dan sosialis yaitu

FrenteAmplio (Klimovich & Thomas, 2014, p. 188). Sementara itu, beberapa kelompok kepentingan lainnya di bagi kedalam beberapa kategori seperti:

Tabel 3.6 Kelompok Kepentingan di Uruguay

Nama Kelompok Kepentingan	Sektor/Jenis Kepentingan
<ul style="list-style-type: none"> • The Association of Bankers • National Chamber of Commerce (CNC) 	Bisnis
<ul style="list-style-type: none"> • The Chamber of Industries of Uruguay (CIU) 	Industri
<ul style="list-style-type: none"> • Estancierus • Federacion and Asociacion Rural 	Perlindungan Masyarakat Desa

Source: (Handelman, 1979).

Kelompok kepentingan di Uruguay memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang disebabkan beberapa hal seperti:

1. Kemampuan untuk menggunakan instrumen hukum seperti plebisit dan referendum untuk memaksakan kepentingannya untuk dipenuhi secara menyeluruh.
2. Kelompok kepentingan memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara Ex ante (sebelum diambilnya sebuah kebijakan) dan Ex post (evaluasi dari kebijakan yang telah di implementasikan). Hal tersebut yang kemudian memberikan tekanan kepada kekuasaan eksekutif dan legislatif (Bergara, et al., 2004, p. 43).

Paska terpilihnya Tabare Vazques dari partai Frente Amplio (FA) sebagai Presiden Uruguay pada tahun 2005, komitmen Uruguay terhadap integrasi kawasan

di bawah Mercosur semakin kuat. Hal tersebut dibuktikan dari kampanye Vazques saat pemilu dimana ia akan berkomitmen untuk melakukan promosi integrasi kawasan khususnya di dalam Mercosur. Selain itu, komitmen Vazques terhadap proses integrasi Mercosur juga disampaikan melalui pidato di Mercosur Summit pada Juni 2005. Berikut merupakan isi pidato Vazques terhadap integrasi kawasan:

“The special political moment that Mercosur is experiencing demands more than ever that we go further in cultural integration and in integrating the citizens of the region... It is the moment to move forward in the construction of a Mercosur citizens, because this will be the democratic domain in which we painstakingly carry on building our agreement. We should assume that we are all Mercosur (*somos Mercosur* in the Spanish original) and that the success of this great political project depends on all us.”

Dalam pidato tersebut Vazques menggunakan *somos Mercosur* untuk memperkuat integrasi di level social, politik, budaya yang dianggap penting untuk mewujudkan integrasi kawasan di bawah Mercosur. Selain itu, *somos Mercosur* juga digunakan untuk tujuan mendemokrasikan blok Mercosur tidak hanya di level pemerintah tetapi juga masyarakat yang ada di negara anggota (Ruiz, 2012).

Komitmen Vazques untuk mendukung terciptanya kawasan yang terintegrasi di bawah institusi Mercosur tampaknya belum menemukan hasil yang baik. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penolakan dan praktik politisasi yang dilakukan oleh kelompok kepentingan yang ada di Uruguay yang menyebabkan gagalannya pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan yang mendukung proses integrasi Mercosur. Pada awal kepemimpinannya, Vazquez mengumumkan akan membuat kebijakan terkait rencana darurat nasional sebesar 200 juta dollar untuk membantu sekitar 20% warga miskin di Uruguay. Selain itu, Vazques juga berjanji akan menyelesaikan permasalahan di Uruguay baik itu masalah ekonomi ataupun permasalahan mengenai

pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi selama masa kediktatoran militer 1973-1985 di Uruguay (Weinstein, 2017). Namun dikarenakan perekonomian yang melambat selama beberapa tahun terakhir dimana GDP Uruguay mengalami penurunan dari 1,5% di tahun 2014 menjadi 1,4% di tahun 2016, membuat pemerintahan Vazquez mengubah kebijakannya ke arah yang lebih pragmatis (IMF, 2016).

Pada tahun 2016, Vazquez mengubah kebijakannya untuk merespon lambatnya pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Untuk itu, Vazquez mengalihkan fokusnya ke sektor energi. Uruguay merupakan negara yang terkenal dengan negara yang memiliki energi terbarukan dalam jumlah besar di kawasan, namun potensi energi terbarukan tersebut belum membuat Vazquez berhenti untuk terus mencari sektor potensial. Dalam memenuhi ambisinya, Vazquez meminta perusahaan minyak seperti ExxonMobil, Statoil untuk melakukan pengeboran di lepas pantai Uruguay guna mencari potensi minyak bumi yang ada di negara tersebut. Namun kebijakan Vazquez tersebut mendapat respon keras dari mantan presiden partai sayap kanan Colorado yang menilai upaya yang dilakukan Vazquez akan memperburuk kondisi pemanasan global ditambah lagi hal tersebut tidak sesuai dengan komitmen Uruguay untuk melindungi lingkungan dari semakin parahnya pemanasan global.

Untuk memperbaiki perekonomian di Uruguay, Vazquez kemudian mendekati negara tersebut ke Free Trade Agreement ke Uni Eropa terutama sektor jasa melalui institusi Mercosur. Namun langkah tersebut kembali ditolak oleh kelompok kepentingan yang ada di Uruguay. Asosiasi buruh menganggap Free Trade

Agreement hanya akan membahayakan produsen lokal yang ada di Uruguay sehingga asosiasi tersebut melakukan praktik politisasi dengan cara mendorong anggota parlemen melalui demonstrasi untuk menolak perjanjian tersebut (Jordan, 2016). Sebelumnya, pada tahun 2006 pemerintahan Vazquez pernah membuat perjanjian Free Trade dengan US sebagai akibat dari adanya dorongan dari commercial interest dan adanya komplain negara tersebut terhadap Mercosur yang melakukan marginalisasi terhadap posisi negara tersebut. Untuk itu, Uruguay dan Amerika Serikat sepakat untuk melakukan penandatanganan perjanjian Bilateral Investment Treaty pada 2005 yang baru dilaksanakan pada 1 November 2006 dan membuat Trade and Investment Framework Agreement pada 2007 (Singh, 2008, p. 527). Perjanjian bilateral yang dibuat oleh Uruguay tersebut mendapat kecaman keras dari negara Mercosur yang menganggap hal tersebut akan mengganggu proses integrasi. Merespon hal tersebut, Uruguay menilai bahwasannya Mercosur hanya mementingkan kepentingan negara besar tanpa melihat kesejahteraan negara kecil (COHA, 2006).

Praktik politisasi di Uruguay yang dilakukan oleh kelompok kepentingan menjadi semakin kuat ketika kelompok tersebut mampu menggunakan instrument hukum dan pendekatan terhadap pemerintah dalam memenuhi kepentingannya. Kelompok tersebut kemudian melakukan pendekatan terhadap anggota parlemen Uruguay untuk menolak kebijakan Vazquez tersebut sehingga masih akan sangat sulit bagi Mercosur untuk mewujudkan integrasi karena sulitnya melakukan koordinasi kebijakan antara pemerintah dan kelompok kepentingan yang ada di negara anggota.

Selain itu, dengan adanya pandangan negatif dari pemerintah Uruguay yang menilai Mercosur telah melakukan marginalisasi terhadap negaranya sehingga berdampak adanya pada tindakan provokatif dari pemimpin Uruguay yaitu Vazquez untuk membentuk perjanjian bilateral dengan USA juga akan mengganggu proses integrasi Mercosur. Beberapa hal yang menyebabkan ketidakpuasan Uruguay terhadap Mercosur dikarenakan beberapa hal:

1. Mercosur gagal dalam melakukan sinkronisasi kebijakan ke level domestik sebuah negara. Negara anggota Mercosur khususnya negara besar seperti Brazil dan Argentina seringkali membuat kebijakan nasional yang bertentangan dengan hasil kesepakatan di Mercosur.
2. Tidak kuatnya komitmen negara anggota untuk mengimplementasikan kebijakan Mercosur.
3. Adanya sengketa yang melibatkan Uruguay dan Argentina terkait permasalahan lingkungan. Ketidakpuasan tersebut didasarkan pada lemahnya mekanisme penyelesaian Mercosur dalam menyelesaikan sengketa sehingga harus di bawa ke International Court of Justice. (Vaillant, 2007)

Dari beberapa studi kasus politisasi yang terjadi di negara anggota Mercosur dapat dilihat bahwasannya tren permasalahan yang menjadi faktor penghambat proses integrasi di periode 2000-2018 berbeda dengan permasalahan yang ada di proses integrasi pada periode 1991-1999. Permasalahan baru yang muncul di proses integrasi pada 2000-2018 tersebut adalah karena gejolak politik domestik yang disebabkan oleh adanya praktik politisasi yang terjadi di negara anggota Mercosur sehingga

berdampak pada proses integrasi. Politisasi tersebut berdampak pada semakin jauhnya negara anggota dari proses integrasi. Politisasi tersebut tidak hanya menghasilkan output di level domestik seperti perubahan sistem pemerintahan dan ideologi politik, tetapi juga berdampak pada output di level regional seperti meningkatnya tensi antarnegara anggota dengan studi kasus Paraguay.

Perspektif postfunctionalism telah menjelaskan faktor-faktor kegagalan integrasi Mercosur yang sebagian besar disebabkan oleh adanya pengaruh dari aktor non-negara seperti kelompok kepentingan, asosiasi masyarakat dan elit politik dalam mempengaruhi kebijakan dan situasi politik domestik yang berdampak pada semakin jauhnya negara anggota terhadap proses integrasi. Dalam mempengaruhi kebijakan dan situasi politik domestik, beberapa aktor non-negara tersebut melakukan tindakan politisasi guna menjamin kepentingannya sehingga berdampak pada terhambat atau gagalnya proses integrasi. Dengan kata lain, dinamika tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan Mercosur mengancam *self-determination* dari aktor non-negara di masing-masing negara anggota, sehingga menimbulkan tekanan dari domestik di masing-masing negara anggota untuk menolak proses integrasi tersebut. Dengan data bahwa masih banyaknya praktik politisasi yang dilakukan oleh aktor non-negara di negara anggota Mercosur seperti yang sudah dijelaskan, maka integrasi pada periode 2000-2018 gagal untuk diwujudkan.